

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dimana sampel yang diambil disesuaikan dengan tujuan peneliti. Populasi pada penelitian ini yaitu desa-desa yang berada di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan diambil sebanyak 23 desa sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, 23 desa tersebut menjadi sampel pada penelitian ini.

Tabel 4.1
Penyebaran Kuisisioner

No.	Nama Desa	Kuesioner disebar	Kuesioner kembali
1	PRIAN	5	5
2	APITAIK	5	5
3	KUANG RUNDUN	5	5
4	KILANG	5	5
5	SAJANG	5	4
6	AIKMEL	5	4
7	RUMBUK	5	4
8	PRINGGASELA	5	4
9	PEMONGKONG	5	4
10	PESANGGRAHAN	5	4
11	SENANGGALIH	5	4
12	LENDANG BELO	5	4
13	SUKARARA	5	4
14	JURIT	5	4
15	SEPAPAN	5	4
16	SUKADANA	5	4
17	PAOK MOTONG	5	4
18	DAMES DAMAI	5	4
19	JERUK MANIS	5	4
20	GELANGGANG	5	4

No.	Nama Desa	Kuesioner disebar	Kuesioner kembali
21	LENEK LAUK	5	2
22	SUELA	5	1
23	PRIGI	5	1
Total		115	88
Kuesioner yang dapat diolah			80
Presentase kuisisioner kembali			77%

Sumber: Data primer diolah 2018

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa setiap desa yang dijadikan sampel penelitian diambil 4-5 responden untuk mengisi kuesioner penelitian. Total kuesioner yang disebar kepada responden sebanyak 115 kuesioner pada desa-desa di Kabupaten Lombok Timur dimana terdapat 23 desa yang dipilih, 88 kuesioner yang dapat kembali dengan tingkat pengembalian sebesar 77% dan 80 kuesioner yang dapat digunakan untuk diolah dalam penelitian ini.

Tabel 4.2

Data Responden

Jumlah Sampel		Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	48	60%
	Perempuan	32	40%
Jumlah		80	100%
Pendidikan	SD	4	5%
	SMP	28	35%
	SMA	27	34%
	Diploma	0	0%
	S1	21	26%
	S2	0	0%
Jumlah		80	100%
Umur	<20 thn	0	0%
	20 – 35 thn	24	30%
	35 – 50 thn	38	47,5%
	>50 thn	18	22,5%
Jumlah		80	100%

Jumlah Sampel	Frekuensi	Persentase	
Lama bekerja di Pemerintah Desa	<1 thn	15	18,75%
	1 – 5 thn	34	42,5%
	6 – 10 thn	26	32,5%
	>10 thn	5	6,25%
Jumlah	80	100%	

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.2 terdapat 80 responden dengan jumlah responden laki-laki sebanyak 48 dengan persentase 60% dari total responden dan jumlah responden perempuan sebanyak 32 dengan persentase sebesar 40% dari total responden. Tingkat pendidikan dari responden untuk Sekolah Dasar (SD) sebanyak 4 responden dengan persentase sebesar 5%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 28 responden dengan persentase sebesar 35%, setara Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 27 responden dengan persentase sebesar 34%, responden dengan tingkat pendidikan Diploma tidak ada, responden dengan latar belakang pendidikan terakhir sarjana (S1) sebanyak 21 responden dengan persentase sebesar 26%, dan responden dengan tingkat pendidikan magister (S2) tidak ada. Informasi mengenai umur responden dengan umur <20 tahun tidak ada, responden dengan rentang umur 20-35 tahun sebanyak 24 responden dengan persentase sebesar 30%, responden dengan umur antara 35-50 tahun sebanyak 38 responden dengan persentase sebesar 47,5%, dan responden dengan umur >50 tahun sebanyak 18 responden dengan persentase sebesar 22,5%.

Jumlah responden dengan lama bekerja di pemerintah desa <1 tahun sebanyak 15 responden dengan persentase sebesar 18,75%, 1-5 tahun bekerja di

pemerintah desa sebanyak 34 responden dengan persentase sebesar 42,5%, responden dengan lama bekerja di pemerintah desa selama 6-10 tahun sebanyak 26 responden dengan persentase sebesar 32,5%, dan responden dengan lama bekerja di pemerintah desa >10 tahun sebanyak 5 responden dengan persentase sebesar 6,25%.

B. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memuat penjelasan mengenai data yang dapat diolah dalam penelitian dengan bentuk tabel, diagram, grafik dan lainnya untuk mempermudah dalam membuat kesimpulan data secara menyeluruh. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran mengenai nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan *standart deviation* dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.3
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TOTAL_PKD	80	16	24	20.51	2.164
TOTAL_KAD	80	17	28	23.31	2.369
TOTAL_KPK	80	20	28	24.66	2.470
TOTAL_KPBPDP	80	10	28	22.33	3.831
TOTAL_SDM	80	14	28	23.69	3.204
Valid N (listwise)	80				

Sumber: Data primer diolah, 2018

Hasil uji statistik deskriptif dari masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat diketahui melalui Tabel 4.3. Berdasarkan Tabel 4.3 hasil uji statistik deskriptif dapat diketahui terdapat 5 variabel penelitian, diantaranya kinerja

pengelolaan keuangan desa (PKD), kapasitas aparatur desa (KAD), ketaatan pelaporan keuangan (KPK), kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa (KPBPB), dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Sesuai dengan Tabel 4.3 bahwa variabel kinerja pengelolaan keuangan desa dengan jumlah data sebanyak 80 memiliki nilai rata-rata 20,51 dengan nilai minimum sebesar 16, nilai maksimum sebesar 24, dan mempunyai nilai *standard deviation* 2,164. Variabel kapasitas aparatur desa dengan jumlah data sebanyak 80 memiliki nilai rata-rata 23,31 dengan nilai minimum sebesar 17, nilai maksimum sebesar 28, dan mempunyai nilai *standard deviation* sebesar 2,369. Variabel ketaatan pelaporan keuangan dengan jumlah data sebanyak 80 memiliki nilai rata-rata sebesar 24,66 dengan nilai minimum sebesar 20, nilai maksimum sebesar 28, dan mempunyai nilai *standard deviation* sebesar 2,470. Variabel kualitas pengawasan BPD dengan jumlah data sebanyak 80 memiliki nilai rata-rata 22,33 dengan nilai minimum sebesar 10, nilai maksimum sebesar 28, dan mempunyai nilai *standard deviation* sebesar 3,831. Variabel sumber daya manusia dengan jumlah data sebanyak 80 memiliki nilai rata-rata 23,69 dengan nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum sebesar 28, dan mempunyai nilai *standard deviation* sebesar 3,204.

C. Uji Kualitas Instrumen dan Data

1. Uji Validitas dan Reliabilitas.

a. Uji Validitas

Validitas merupakan tingkat keandalan dan keabsahan dari sebuah alat ukur yang digunakan. Menurut Sugiyono dalam Nazaruddin dan Basuki (2017) instrumen pengukur dikatakan valid apabila instrumen pengukur tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Disimpulkan bahwa instrumen pengukur yang valid adalah instrumen yang benar-benar tepat untuk mengukur apa yang akan diukur. Validitas data dapat dilihat dari nilai total *Bivariate Correlation Pearson r* hitung lebih besar daripada *r* tabel dan nilai signifikansi tidak lebih dari 0,05 pada program olah data SPSS versi 16.0 untuk *windows*.

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r-hitung	Signifikansi	Keterangan
Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (PKD)	PKD1	0,735	0,000	Valid
	PKD2	0,591	0,000	Valid
	PKD3	0,717	0,000	Valid
	PKD4	0,704	0,000	Valid
	PKD5	0,756	0,000	Valid
	PKD6	0,727	0,000	Valid
Kapasitas Aparatur Desa (KAD)	KAD1	0,592	0,000	Valid
	KAD2	0,460	0,000	Valid
	KAD3	0,701	0,000	Valid
	KAD4	0,642	0,000	Valid
	KAD5	0,783	0,000	Valid
	KAD6	0,675	0,000	Valid
	KAD7	0,712	0,000	Valid

Variabel	Item	r-hitung	Signifikansi	Keterangan
Ketaatan Pelaporan Keuangan (KPK)	KPK1	0,555	0,000	Valid
	KPK2	0,675	0,000	Valid
	KPK3	0,796	0,000	Valid
	KPK4	0,733	0,000	Valid
	KPK5	0,585	0,000	Valid
	KPK6	0,710	0,000	Valid
	KPK7	0,737	0,000	Valid
Kualitas Pengawasan BPD (KPBPD)	KPBPD1	0,858	0,000	Valid
	KPBPD2	0,869	0,000	Valid
	KPBPD3	0,899	0,000	Valid
	KPBPD4	0,912	0,000	Valid
	KPBPD5	0,803	0,000	Valid
	KPBPD6	0,857	0,000	Valid
	KPBPD7	0,798	0,000	Valid
Sumber Daya Manusia (SDM)	SDM1	0,779	0,000	Valid
	SDM2	0,772	0,000	Valid
	SDM3	0,842	0,000	Valid
	SDM4	0,825	0,000	Valid
	SDM5	0,874	0,000	Valid
	SDM6	0,598	0,000	Valid
	SDM7	0,808	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.5 mengenai hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua instrumen pengukur dalam bentuk pernyataan kuesioner dari masing-masing variabel penelitian memiliki nilai *Pearson Correlation* pada r hitung $\geq 0,05$ yang merupakan nilai dari t tabel dari 5 variabel dan jumlah data sebanyak 80, sehingga semua instrumen pernyataan kuesioner valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai dari *Cronbach's Alpha* pada uji statistik dalam program olah data SPSS. Menurut sugiyono (2014) menjelaskan bahwa instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel apabila nilai dari *Cronbach's Alpha* $\geq 0,05$. Hasil uji reliabilitas disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	0,777	Reliabel
Kapasitas Aparatur Desa	0,760	Reliabel
Ketaatan Pelaporan Keuangan	0,770	Reliabel
Kualitas Pengawasan BPD	0,802	Reliabel
Sumber Daya Manusia	0,791	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.6 terdapat hasil pengujian reliabilitas, dimana nilai *Cronbach's Alpha* dari semua variabel dalam penelitian ini lebih dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian pada setiap variabel dalam penelitian ini adalah reliabel, dengan kata lain pernyataan-pernyataan dalam instrumen penelitian ini konsisten sehingga dapat digunakan pada penelitian lain dengan subyek yang sama.

D. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan, variabel pengganggu, dan residual mempunyai distribusi normal. Telah dilakukan pengujian normalitas untuk penelitian ini dengan hasil dibawah ini :

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.18019288
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.106
	Negative	-.097
Kolmogorov-Smirnov Z		.947
Asymp. Sig. (2-tailed)		.331

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data primer diolah, 2018

Hasil uji normalitas dengan uji *One Kolmogorov-Smirnov Test* disajikan pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa besaran signifikansi adalah 0,331. Syarat data berdistribusi normal dengan nilai dari signifikansi lebih dari 0,05. Melihat hasil uji normalitas diatas lebih dari 0,05 dengan nilai signifikansi 0,331 dapat disimpulkan bahwa data dapat berdistribusi dengan normal dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan statistika parametrik.

2. Uji Multikolinearitas.

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi pada penelitian terdapat korelasi antar variabel bebas. Antar variabel penelitian dikatakan memiliki korelasi dapat dilihat melalui nilai

dari *tolerance value* dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Berikut hasil uji multikolinieritas yang ditampilkan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kapasitas Aparatur Desa	0,376	2,660	Tidak mengalami multikolinieritas
Ketaatan Pelaporan Keuangan	0,411	2,435	Tidak mengalami multikolinieritas
Kualitas Pengawasan BPD	0,574	1,741	Tidak mengalami multikolinieritas
Sumber Daya Manusia	0,472	2,117	Tidak mengalami multikolinieritas

Sumber: Data primer diolah, 2018

Hasil pengujian multikolinieritas sesuai dengan Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa semua variabel independen pada penelitian ini memiliki nilai $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,10$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel independen dalam penelitian ini dan tidak mengandung multikolinieritas dalam model regresi yang digunakan.

3. Uji Heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian yang digunakan dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Data mengalami heteroskedastisitas dapat dilihat melalui uji gletser pada program olah data SPSS yang ditentukan melalui nilai signifikansinya.

Hasil uji heteroskedastisitas penelitian ini ditampilkan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 4.8
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Kesimpulan
Kapasitas Aparatur Desa	0,376	Homoskedastisitas
Ketaatan Pelaporan Keuangan	0,411	Homoskedastisitas
Kualitas Pengawasan BPD	0,574	Homoskedastisitas
Sumber Daya Manusia	0,472	Homoskedastisitas

Sumber: Data primer diolah, 2018

Model regresi dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi dari uji gletser $<0,05$ dan sebaliknya apabila nilai signifikansi dari uji gletser $>0,05$ maka model regresi terkena heteroskedastisitas. Sesuai dengan Tabel 4.9 hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel independen pada penelitian ini dengan model regresi yang digunakan memiliki nilai signifikansi $<0,05$ semua, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel pada penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

E. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

1. Uji Nilai t.

Pengujian secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen merupakan cara untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Syarat variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dapat dilihat dari nilai koefisien regresi searah dengan hipotesis dan nilai signifikansi pada uji t,

apabila nilai signifikansi $>0,05$ maka hipotesis tidak diterima atau tertolak. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi dari uji $t <0,05$ maka hipotesis diterima, dengan kata lain variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujian dapat dilihat dalam tabel *Coefficients* pada sistem olah data SPSS versi 16.0.

Tabel 4.9
Hasil Uji Regresi Linier Berganda untuk Pengaruh Kapasitas Aparatur
Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan, Kualitas Pengawasan BPD,
Kualitas Sumber Daya Manusia, terhadap Kinerja Pengelolaan
Keuangan Desa

		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.741	1.458		1.879	.064		
	TOTAL_KAD	.180	.094	.197	1.916	.054	.376	2.660
	TOTAL_KPK	.372	.086	.424	4.317	.000	.411	2.435
	TOTAL_KPBPDP	.255	.047	.452	5.435	.000	.574	1.741
	TOTAL_SDM	-.054	.062	-.080	-.875	.384	.472	2.117

a. Dependent Variable: TOTAL_PKD

Sumber: Data primer diolah, 2018

Tabel 4.10
Hasil Penelitian (Uji Nilai t)

Hipotesis		B	Sig.	Kesimpulan
H ₁	Kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.	0,180	0,054	Diterima
H ₂	Ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan	0,372	0,000	Diterima
H ₃	Kualitas pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.	0,255	0,000	Diterima
H ₄	Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.	-0,054	0,384	Ditolak

Sumber: Data primer diolah, 2018

a. Pengujian Hipotesis 1

Berdasarkan Tabel 4.10 hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh secara positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,180 atau positif sesuai dengan hipotesis dan nilai signifikansi sebesar 0,054 dimana kurang dari α yaitu 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian hipotesis 1 diterima.

b. Pengujian Hipotesis 2

Berdasarkan Tabel 4.10 hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien

regresi (B) sebesar 0,372 atau positif sesuai dengan hipotesis dan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana kurang dari α yaitu 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketaatan regulasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian hipotesis 2 diterima.

c. Pengujian Hipotesis 3

Berdasarkan Tabel 4.10 hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa berpengaruh secara positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,255 atau positif sesuai dengan hipotesis dan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana kurang dari α yaitu 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian hipotesis 3 diterima.

d. Pengujian Hipotesis 4

Berdasarkan Tabel 4.10 hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar -0,054 atau negatif tidak sesuai dengan hipotesis dan nilai signifikansi sebesar 0,384 dimana lebih dari α yaitu 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian hipotesis 4 ditolak.

2. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji koefisien determinasi merupakan pengujian yang dilakukan terhadap model regresi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin tinggi nilai *R square* (R^2) maka kemampuan variabel independen penelitian semakin tinggi berkontribusi terhadap variabel dependen.

Tabel 4.11
Hasil Penelitian (Uji Koefisien Determinasi)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.838 ^a	.703	.687	1.211

a. Predictors: (Constant), TOTAL_SDM, TOTAL_KPK, TOTAL_KPBP, TOTAL_KAD

b. Dependent Variable: TOTAL_PKD

Sumber: Data primer diolah, 2018

Hasil uji determinan koefisiensi sesuai dengan Tabel 4.11 menjelaskan bahwa variabel independen penelitian berkontribusi sebesar 68,7% terhadap variabel dependen kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut, dapat dilihat pada Tabel 4.11 bahwa nilai nilai dari *Adjusted R Square* sebesar 0,687 atau 68,7% dan 31,3% diwakili oleh variabel bebas lainnya di luar model.

3. Uji Nilai F.

Uji F atau uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersamaan atau secara simultan berpengaruh

terhadap variabel dependen. Pengaruh tersebut dapat dilihat melalui tabel ANOVA bagian kolom F dan kolom signifikan. Variabel independen berpengaruh secara simultan apabila nilai dari F hitung lebih besar dari nilai F tabel, dimana F tabel sendiri sebesar 2,394 untuk jumlah variabel independen sebanyak 5 variabel dengan data yang diolah sebanyak 80. Nilai signifikansi harus kurang dari 0,05 sebagai level signifikansi.

Tabel 4.12
Hasil Penelitian (Uji Nilai F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	259.952	4	64.988	44.296	.000 ^a
	Residual	110.036	75	1.467		
	Total	369.987	79			

a. Predictors: (Constant), TOTAL_SDM, TOTAL_KPK, TOTAL_KPBPDP, TOTAL_KAD

b. Dependent Variable: TOTAL_PKD

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji nilai F di atas pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 44,296, hal tersebut lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansi dari hasil uji di atas menunjukkan 0,000, dimana kurang dari 0,05 yang menjadi level signifikansi. Oleh karena itu, variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

F. Pembahasan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bukti empiris dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan uji t yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa sedangkan variabel

kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Berikut pembahasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa.

1. Pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama pada uji t menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini mengungkapkan bahwa semakin tinggi kapasitas yang dimiliki aparatur desa dalam sebuah desa maka akan berbanding lurus dengan kinerja yang dihasilkan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu semakin bagus.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya dari Munti dan Fahlevi (2017) yang menyatakan kapasitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu suatu organisasi atau suatu sistem dalam melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan.

Hasil penelitian ini didasari dengan teori motivasi, dimana teori motivasi menjelaskan tentang pencapaian kinerja suatu organisasi. Sesuai dengan Tabel 4.3 bahwa Variabel kapasitas aparatur desa dengan jumlah data sebanyak 80 memiliki nilai rata-rata 23,31 dengan nilai minimum sebesar 17, nilai maksimum sebesar 28, dan mempunyai nilai standard deviation sebesar

2,369. Aparatur desa merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintah desa, dalam hal ini aparatur desa sebagai steward yang memiliki kewajiban dan kewenangan terhadap pekerjaan yang diserahkan kepada mereka oleh masyarakat sebagai prinsipal. Kewenangan aparatur desa meliputi seluruh kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, perlu adanya kemampuan, pemahaman, dan ketrampilan yang dimiliki oleh setiap aparatur desa. Kapasitas tersebut diperlukan agar aparatur desa dapat memberikan kinerja terbaik, sehingga tujuan dari pengelolaan keuangan desa dapat tercapai.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan alasan pemerintah desa untuk merekrut aparatur desa yang lebih tinggi kualifikasi pendidikannya. Berdasarkan hasil penelitian ini yang dilakukan di 23 desa dalam wilayah Kabupaten Lombok Timur, aparatur desa rata-rata pendidikan terakhir yaitu SMP dan SMA. Menurut data yang didapatkan dari 80 responden sebesar 35% latar belakang pendidikan terakhir SMP dan sebesar 34% berlatar belakang pendidikan terakhir SMA, sedangkan aparatur desa dengan pendidikan terakhir sarjana (S1) hanya 26%. Meskipun tingkat pendidikan aparatur desa rata-rata rendah namun juga sebagian besar mereka juga belum lama memahami soal pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata aparatur desa dengan lama bekerja di pemerintah desa masih dibawah 10 tahun, 75 (93,75%) responden dari 80 total reponden masih bekerja kurang dari 10 tahun.

2. Pengaruh ketaatan pelaporan keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua pada uji t menunjukkan bahwa ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini mengungkapkan bahwa semakin tinggi pemerintah desa dalam taat atau tertib terhadap undang-undang yang berlaku mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan, dan pertanggungjawaban, maka kinerja pengelolaan keuangan desa akan semakin baik. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu Munti dan Fahlevi (2017) yang menyatakan semakin taat aparatur desa terhadap pelaporan keuangan maka semakin bagus pula kinerja pengelolaan keuangan suatu desa tersebut.

Hasil penelitian ini didasari dengan teori kepatuhan, dimana teori kepatuhan ini menjelaskan tentang bagaimana seorang taat terhadap apa yang telah diberlakukan, dalam hal ini jika aparatur desa taat dalam pelaporan keuangan artinya taat dalam beraktivitas sesuai kebijakan dan aturan pada desa, maka hal itu akan mengurangi dampak terjadinya kecurangan (fraud). Sesuai dengan tabel 4.3 variabel ketaatan pelaporan keuangan dengan jumlah data sebanyak 80 memiliki nilai rata-rata sebesar 24,66 dengan nilai minimum sebesar 20, nilai maksimum sebesar 28, dan mempunyai nilai standard deviation sebesar 2,470.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Isi permendagri tersebut bahwa setiap desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa harus menggunakan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin

anggaran. Asas-asas pengelolaan keuangan desa digunakan untuk menunjang kelancaran pengelolaan keuangan desa dengan keterbukaan, keandalan, keterlibatan masyarakat sebagai prinsipal sehingga cita-cita dan hak dari masyarakat dapat terpenuhi. Laporan keuangan desa harus dibuat secara konsisten dan tepat waktu serta pencatatan dilakukan sesuai dengan jumlah di lapangan membantu perumusan anggaran desa periode selanjutnya dalam pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan keuangan desa.

Ketika pelaporan keuangan itu tidak dapat dilakukan secara tepat waktu dan tepat substansinya, maka sudah terjadi pelanggaran besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Permendagri No. 113 Tahun 2014 digunakan sebagai pedoman pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Adanya pedoman yang digunakan, dapat memberikan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan yang diinginkan.

3. Pengaruh kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga pada uji t menunjukkan bahwa kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengawasan aparatur yang lebih baik, aparatur akan lebih bekerja keras untuk mencapai tujuan bersama yang sudah ditentukan oleh desa atau kelurahan secara bersama-sama. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian Munti dan Fahlevi (2017) yang menyatakan bahwa kualitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD pemerintah desa semakin baik maka akan berbanding lurus dengan kinerja yang dihasilkan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu semakin baik.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori motivasi dimana kualitas pengawasan dilakukan dengan cara mendorong atau memotivasi orang yang tepat untuk mencapai hasil yang tepat. Sesuai dengan tabel 4.3 bahwa Variabel kualitas pengawasan BPD dengan jumlah data sebanyak 80 memiliki nilai rata-rata 22,33 dengan nilai minimum sebesar 10, nilai maksimum sebesar 28, dan mempunyai nilai standard deviation sebesar 3,831.

Badan permusyawaratan desa memiliki peranan yang penting dalam pemerintahan desa. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa memaparkan bahwa BPD memiliki fungsi sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat dengan ikut membahas dan mensepakati APBDesa. Selain fungsi aspirasi yang dimiliki oleh BPD, BPD memiliki fungsi pengawas terhadap kinerja dari aparatur desa selaku penggerak roda pemerintahan. Sesuai pernyataan dari Dwipayana et al. (2003) bahwa BPD memiliki peran sebagai jembatan elemen masyarakat dengan pemerintah desa, dengan kata lain BPD menjadi aktor politik masyarakat yang paling dekat dan nyata dalam sebuah desa.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD termuat dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 61 bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa. Fungsi pengawasan BPD membuat aparatur desa untuk lebih transparan dalam menggunakan anggaran keuangan desa, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penggunaan anggaran dan penyelewengan keuangan desa, sehingga penggunaan keuangan desa dapat bekerja tepat sasaran.

4. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat pada uji t menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini mengungkapkan bahwa baik tidaknya kualitas sumber daya para aparatur desa tentu tidak akan mempengaruhi kinerja dari pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan Kusuma (2013) yang menyatakan bahwa aspek pendidikan sangat penting bagi seorang pegawai, orang-orang yang berpendidikan lebih tinggi secara umum mempunyai peluang yang lebih besar untuk dapat bekerja secara efisien dan efektif.

Setiap individu dengan kualitas apapun wajib menjunjung tinggi kesepakatan dan bertanggung jawab sepenuh hati, berusaha keras dalam mencapai target, bertanggung jawab dengan pekerjaan yang wajib dikerjakan, menjalankan tugas sesuai dengan aturan organisasi, berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dibuat dimana menjadi tanggungjawabnya. Hal tersebut memerlukan dukungan dari organisasi melalui pemberian perhatian, pelatihan dan kepercayaan kepada setiap individu dalam menjalankan tugasnya.

Aparatur desa di Kabupaten Lombok Timur pada dasarnya memiliki kualitas SDM yang tinggi, akan tetapi pada pengelolaan keuangan desa banyak aparatur desay yang tidak sesuai dengan bidangnya. Upaya pelatihan serta sistem reward dan punishment yang diterapkan dalam lingkup kerja pemerintah daerah menjadi cara pemerintah mengatasi determinasi kualitas

SDM tersebut.